

## PERAN GERAKAN BURUH DALAM MEMPERJUANGKAN KESEJAHTERAAN UPAH DI INDONESIA (KAJIAN LITERATUR GERAKAN SERIKAT BURUH INDEPENDEN)

Anupita Larasayu<sup>1</sup>, Subhan Widiensyah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

[2290200069@untirta.ac.id](mailto:2290200069@untirta.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Diserahkan tanggal 28 Juni 2023 | Diterima 28 Juni 2023 | Diterbitkan tanggal 30 Juni 2023

### Abstract:

*This paper analyzes the social movements carried out by workers in demanding wage welfare. Through the analysis of the movement carried out by the Association of independent labor unions together with other workers in demanding the right to fulfillment and an increase in work wages. The government on the rules that stipulate the minimum wage often sided with the employers which was usually followed by a strike by the workers or workers. The root of this problem, of course, is usually triggered by the regulation of setting minimum wages, which workers consider inappropriate and inappropriate in providing minimum wages and demanding welfare for workers. The minimum wage has the aim of providing protection for workers from a small minimum wage, so that the minimum wage promotes the creation of justice for workers and also does not harm employers to fulfill the daily needs of the workers. Employers and workers both have the continuity of life which will also have an impact on the progress of the company, the government has a function in regulating decent wages for workers. The purpose of this analysis is to analyze the influence of the GSBI movement in voicing aspirations with other workers. This analysis uses a descriptive qualitative approach with the analytical method.*

**Keywords:** GSBI, Labor Movement, Wages, Civil Society

### Abstrak:

*Tulisan ini menganalisis tentang gerakan sosial yang dilakukan oleh para buruh dalam menuntut kesejahteraan upah. Melalui analisa gerakan yang dilakukan oleh Gabungan serikat buruh independen bersama buruh lain nya dalam menuntut hak atas pemenuhan dan kenaikan upah kerja. Pemerintah pada aturan yang menetapkan upah minimum sering memihak pada pengusaha yang mana biasanya diikuti oleh mogok kerja yang dilakukan oleh buruh atau pekerja. Akar masalah ini tentu biasanya dipicu oleh aturan penetapan upah minimum yang mana para buruh menilai tidak sesuai dan tidak layak dalam memberikan upah minimum dan menuntut kesejahteraan bagi para buruh. Upah minimum memiliki tujuan agar memberi proteksi untuk para buruh dari upah minimum yang kecil, sehingga upah minimum memajukan terciptanya keadilan untuk buruh dan juga tidak merugikan pengusaha untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari para buruh. Pengusaha dan buruh sama-sama memiliki keberlangsungan hidup juga akan berdampak pada majunya perusahaan, pemerintah memiliki fungsi dalam mengatur upah yang layak bagi para buruh. Tujuan dari analisis ini untuk menganalisis pengaruh gerakan GSBI dalam menyuarakan aspirasi bersama kaum buruh yang lainnya. Analisis ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif deskriptif dengan metode analisis.*

**Kata Kunci:** GSBI, Gerakan Buruh, Upah Kerja, Masyarakat Sipil

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



## PENDAHULUAN

Negara berkembang seperti Indonesia memiliki jumlah buruh yang tidak sedikit, kompleks dan dinamis. Salah satu hal yang masih disorot hingga saat ini adalah terkait upah minimum yang dirasa masih sering dipersoalkan di Indonesia. Disisi para buruh mengharapakan upah yang layak atau tinggi, pada pengusaha juga memberatkan sebab akan berdampak pada tingginya operasional atau biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Dalam masalah pengupahan tentu sangat fundamental pada bidang ktenagakerjaan juga bahkan ketika tidak profesional dalam mengatasi pengupahan tidak kaget menjadi bahan pemicu terjadinya perselisihan juga mendorong munculnya mogok kerja serta demonstrasi.

GSBI (Gabungan Serikat Buruh Independen), merupakan kelompok civil society yang menyuarakan aspirasi kaum buruh dan masyarakat sipil lainnya. Sejak tahun berdirinya GSBI yang merupakan kelompok independen, mereka terus konsisten dalam memperjuangkan hak hak bersama kaum buruh, grand narasi yang selalu dibangun adalah menuntut kesejahteraan upah buruh. Seiring perkembangan zaman gerakan buruh terus berafiliasi dengan kepentingan masyarakat dan kepentingan bersama masyarakat dan buruh menjadi agenda yang terus dipertahankan hingga sekarang.

Gerakan adalah sebuah tindakan yang sudah direncanakan maupun tidak direncanakan yang dilakukan oleh suatu individu maupun kelompok dalam suatu organisasi disertai program dan ditujukan pada suatu perubahan atau sebagai gerakan perlawanan untuk melestarikan pola-pola dan lembaga-lembaga. Artinya, dengan adanya sebuah gerakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok ini akan bisa merubah situasi dan kondisi bila gerakan tersebut sudah dengan matang direncanakan dalam sebuah organisasi. Situasi dan kondisi tersebut dibuat karena adanya ketidakadilan terhadap pelaku yang diperlakukan tidak dengan sepenuhnya. Seorang pekerja atau buruh adalah tenaga kerja dan karyawan sebutan untuk buruh yang lebih tinggi dan diberikan kepada buruh yang tidak memakai otot tetapi otak dalam bekerja. Buruh adalah pekerja rendahan, hina, kasar dan sebagainya. Aksi demonstrasi merupakan fenomena yang bisa diketahui sumber pemberitahuannya terkait dengan upah dan kesejahteraan yakni adanya aksi yang dilakukan oleh sejumlah aliansi para buruh Indonesia di Ibu Kota Negara, seperti di dpan kantor Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia (Kemenaker). Para buruh ini kecewa dengan dengan pemerintah lewat surat edaran Kemenaker tentang UMP/UMK yang naik tanpa berunding dengan para serikat kerja.

Mengenai upah tidak bukan saja dari buruh atau pengusaha saja, namun dari pemerintah juga yang memiliki kepentingan. Pemerintah pada kepentingan ini berperan dalam kebijakan soal pengupahan juga kaitanya dengan kesejahteraan rakyat. Sedangkan dari rakyat sendiri mencakup bagaimana bentuk dari seluruh pemerintah, buruh ataupun pengusaha yang berdampak kepada bagaimana sistim pengupahan yang terbangun. Kesejahteraan buruh merupakan pmenuhan kebutuhan juga keperluan yang sifatnya nyata dan abstrak, baik itu dalam ataupun diluar daripada hubungan pekerja atau buruh. Secara langsung maupun tidak langsung bisa menambah produktifitas buruh didalam lingkungan kerjanya yang sehat dan aman. Kesejahteraan pada buruh bisa diberi baik pada bentuk ataupun tidak bentuk uang, adapun kesejahteraan didalam upah biasanya lewat bentuk uang. Adapun kesejahteraan yang bukan uang biasanya terwujud pada bentuk lingkungan yang aman, nyaman, kondusif, harmonis, juga dinamis. Selain daripada itu kesejahteraan yang diberi pada buruh yakni jaminan sosial.

Komponen yang penting yakni upah haruslah diberi kepada buruh oleh pengusaha sebagai rasa jasa dari produk yang dihasilkan. Memberi upah haruslah memiliki standar yang layak sehingga bisa tercukupi kebutuhan sehari-hari para buruh. Disisi lain hadirnya pemerintah memiliki kepentingan agar dapat menetapkan kebijakan pengupahan. Disisi lain juga buruh juga agar dapat terap terjaminnya standar hidup yang baik bagi para buruh serta keluarganya, dapat meningkatkan produktivitas serta daya beli masyarakat yang meningkat. Lain sisi kebijakan pengupahan memiliki maksdu agar dapat mendorong ekonomi agar tumbuh dan juga terdapat

lapangan kerja yang luas supaya inflasi dapat tertahan lajunya. Buruh yang memiliki penghasilan dibawah minimum tidak dapat mencukupi kesehatan dan kebutuhan gizi yang memadai.

Sering terjadinya aksi mogok kerja oleh buruh di daerah-daerah di Indonesia merupakan bentuk kekecewaan buruh terhadap kesejahteraan dan upah yang tidak sebanding. Adanya pergerakan buruh ini sebetulnya dari tahun 1920 yang mana sering ada aksi. Aksi yang dilakukan buruh yakni mogok kerja di Indonesia, kawasan industri sebagai contoh tempat yang sering aksi demonstrasi. Sistem kerja outsourcing dan sistem kerja kontrak merupakan prktek pada bisnis, tetapi di Indonesia serta negara lainya memiliki efek eksploitatip, diskriminasi, degradatip, dan fragmentatip pada buruh ditengah makin turunnya kompetensi, fungsi dan peran.

Hingga saat ini banyak gerakan-gerakan buruh selain GSBI yang membentuk kelompok civil society, Adapun aksi-aksi yang dilakukan oleh para buruh salah satu cara yang ampuh, karenanya penawaran kerja yang besar jika di dibandingkan dengan permintaan yakni amat efektif supaya dapat memperlmah posisi buruh dalm upaya memperjuangkan tuntutan dan haknya. Oleh karenanya aksi mogok kerja merupakan bentuk protes dan unjuk rasa jadi kurun ekekktif jika tenaga buruh kecil permintanya shingga ada buruh pengganti yang bisa didaapat dengan mudah. Melihat fakta dari pasar angkatan kerja ada surplus yang besar menjadi sulit dalam menaikkan upah. Dalam merumuskan terkait upah dan kesejahteraan, buruh memiliki cenderung agar dapat upah yang tinggi supaya mendapat kehidupan yang layak. Adapun pengusaha cenderung ingin memberi upah yang renddah kepada buruh sebab upah berdampak pada keuntungan yang berkurang, sebab semakin tinggi upah yang diberi akan semakin mengurangi keuntungan pengusaha. Hadinya pemerintah melalui kebijakan upah juga dapat membawa kemakmuran bagi rakyat juga negara.

Campur tangan pemerintah menjadi penengah diantara buruh dan pengusaha yang mana berbeda kecenderungan. Pemerintah diminta adil dalam membuaat kebijakan yang terfokus pada masalah upah. Pemerintah diminta hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan upah ini, karena akan berdampak pada kesejahteraan buruh dan tingkat kesejahteraan rakyat jika dalam kebijakan itu pemerintah lebih menguntungkan pengusaha. Jika kebijakan lebih meihak pada buruh dampaknya akan terjadi penghambatan peningkatan ekonomi makro. Didalam keadaan yang mana faktor produkksi seluruhnya terpakai, pada sistem upah ini buruh dan pengusaha bernegosiasi untuk tawar menawar supaya terjadi kesepakatan antara buruh dan pengusaha. Buruh perlu pengusaha sebab dapat membantu dalam menaikkan kesejahteraanya, dan pengusaha juga memerlukan buruh agar dapat mengolah modalnya.

Dari tahun ke tahun masalah ini selalu hadir seakan tidak ada jalan dalam mengupayakan kesejahteraan buruh. Tidak dapat dielak diantar banyaknya permasalahan tentang buruh soal kesejahteraan merupakan problematika yang sensitiff, itu karena masalah yang dibicarakan berkaitan dengan kehidupan orang. Tahun ke tahun masalah yang sama muncul yakni bertujuan menaikkan upah para buruh, karena hal ini yang para buruh merasa tidak sesuai dengan kebutuhan sehari-harinya..

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini tipe metode deskriptif kualitatif dan studi literatur yang dipakai penulis. Yaitu menggambarkan peristiwa atau kondisi gambaran dengan fenomena yang diteliti yang sesuai dengan objek yang diteliti. Adapun teknik yang digunakan pada penelitian ini yakni dengan mengumpullkan data lieratur yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas, serta menuangkannya dalam penelitian. Adapun data literatur yang dipakai berupa sumber dari dokumen, media elektronik, buku, jurnal, dan situs internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Ruslan (2008) studi pustaka merupakan rangkaian yang dilakkukan guna mencari mecnari informasi atau data riset lewat bacaan buku referensi, jurnal ilmiah, juga data yang tersedia diperpustakaan. Ini digunakan sebagai referensi dari sumber bacaam yang bisa memberi informasi yang berhubungan dengan yang diteliti.

Warsiah dan Danial (2009), studi literatur merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari data yang menggunakan metode pengumpulan dari studi pustaka, mencatat dan membaca, kemudian mengolahnya sebagai bahan penelitian yang mana mengumpulkan data lewa buku dan jurnal yang berkaitan dengan apa yang diteliti. Studi literatur merupakan cara guna menyelesaikan permasalahan dengan cara mencari sumber informasi yang sudah ada. Istilah ini juga biasanya disamakan dengan studi pustaka. Pencarian sumber-sumber di internet pun menjadi salah satu teknik metode yang digunakan, karena pada sumber internet juga banyak informasi yang luas sebagai acuan penelitian. Berbagai informasi tentu di zaman sekarang ini sangat dibutuhkan bagi peneliti, juga dilengkapi literatur yang luas yang dapat diakses berupa informasi dari berbagai macam negara. menggunakan internet untuk mencari data informasi yang dapat di masukan dalam penelitian ini menjadikan data bagi penelitian.

## PEMBAHASAN

GSBI (Gerkan Serikat Buruh Independen) berdiri sejak tahun 1999. GSBI merupakan kelompok masyarakat civil yang bergerak dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan kaum buruh dalam menuntut hak upah dan kestabilan politik baik sektoral maupun non sektoral. GSBI sendiri dirancang agar mampu mewujudkan reformasi dalam negeri terhadap perubahan dan kebijakan negara yang di anggap merugikan masyarakat. Selain itu GSBI menjadi organisasi yang terus konsisten hingga saat ini yang disusul dengan organisasi buruh yang lainnya yang sama sama menyuarakan aspirasi upah buruh, kestabilan ekonomi masyarakat.

Buruh merupakan salah satu komponen pendukung dari produksi yang memiliki peran yang penting untuk menghasilkan sebuah produk. Produksi yang dihasilkan oleh buruh tidak luput dari upah sebagai kebutuhan yang wajib diterima buruh. Pada proses produksi, buruh produktivitas yang dihasilkan akan tinggi apabila keadaan tenaganya mencukupi. Ini karena dapat terjadi jika upah yang diterima buruh bisa mencukupi kebutuhan dasar. Produktivitas buruh tidak bisa diabaikan perannya sehingga mendapatkan upah serta kegiatan fisik yang minimum. Kesejahteraan untuk buruh haruslah menjadi point yang penting ketika kita sedang berbicara tentang buruh. Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.25 tahun 1997 tentang kesejahteraan untuk buruh, upah, serta adanya jaminan sosial. Upah merupakan hak yang harus diterima buruh diberikan uang sebagai bentuk imbalan dari pengusaha kepada buruh sebagai balas imbal jasa yang sudah dilakukan buruh, dibayar dan diputuskan menurut kesepakatan kerja dan perjanjian kerja ataupun peraturan yang sudah diatur oleh Undang-Undang termasuk keluarga dan buruh yang mendapatkan tunjangan.

Dari perjalanan gerakan buruh tanggal 1 Mei yang bisa dikenal dengan sebutan may day, menjadi momen yang paling penting untuk menyuarakan segala bentuk aspirasi masyarakat selain melakukan gerakan untuk menuntut hak kenaikan upah kerja tentu ada tuntutan lain yang diperjuangkan karena GSBI berafiliasi dengan civil society yang lain dalam melakukan perubahan sosial dan politik. Berikut merupakan beberapa aspirasi yang di layangkan oleh GSBI bersama masyarakat melalui gerakan may day Dan gerakan aksi bersama pada tanggal 21 Mei 2022.

No.	Tuntutan
1.	Jalankan Reforma Agraria Sejati dan Bangun Industri Nasional.
2.	Tolak Otonomi Khusus (Otsus) Jilid 2 dan DOB Tanah Papua.
3.	Hapuskan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme serta sita seluruh harta Koruptor.
4.	Tolak Otonomi Khusus (Otsus) Jilid 2 dan DOB Tanah Papua.
5.	Hentikan Hutang dan Bantuan Luar Negeri yang hanya memberi beban dan pengurangan pendapatan rakyat, serta lahirnya proyek-proyek nasional yang tak berguna bagi rakyat.
6.	Hentikan berbagai bentuk intimidasi, kekerasan, penangkapan semena-mena, kriminalisasi, pemenjaraan rakyat, serta eksploitasi SDA di seluruh wilayah Indonesia termasuk di tanah

	Papua.
7.	Hentikan monopoli dan perampasan tanah serta pengusuran pemukiman rakyat. Berikan pengakuan sungguh-sungguh pada suku Bangsa minoritas di pedalaman untuk menguasai dan mengolah tanah leluhurnya sendiri tanpa syarat.
8.	Hentikan Overcharging dan Berikan Perlindungan sejati bagi buruh migran Indonesia dan keluarganya
9.	Hentikan liberalisasi, komersialisasi dan privatisasi pendidikan, kesehatan dan fasilitas publik lainnya. Sediakan dan berikan sistem pendidikan, kesehatan, dan perawatan ibu dan anak-anak yang lebih baik di Perdesaan.
10.	Batalkan kenaikan harga BBM PERTAMAX, PPN 11%, Tarif Toll, Dan rencana kenaikan harga gas LPG 3 Kg.
11.	Turunkan Harga Minyak Goreng dan Bahan Pokok Rakyat lainnya serta Berikan jaminan kepastian ketersediaan pasokannya bagi seluruh rakyat.
12.	Tolak Land Bank, Hapuskan Peribaaan, Perbaiki segera Upah Buruh Tani, Beri kaum tani penggarap bagi hasil yang adil, Sediakan bibit, alat pertanian, obat pertanian, pupuk yang banyak dan murah, serta Hapus semua pajak atas seluruh komoditas kaum tani.
13.	Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 190 Tahun 2019 Tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan Di Dunia Kerja.
14.	Berikan Jaminan Sosial Sejati bagi seluruh rakyat indonesia, gratis tanpa mengutip iuran dari rakyat.
15.	Hentikan PHK, Berikan Jaminan Kepastian Kerja bukan Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Hapuskan sistem kerja kontrak jangka pendek dan Outsourcing.
16.	Hapuskan Pengecualan Pajak Penghasilan (PPH21) bagi buruh. Berikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi semua kaum buruh, Bantuan Tunai Langsung (BLT) bagi kaum tani dan seluruh rakyat Indonesia yang layak dan cukup, tanpa syarat, tidak diskriminasi adil-merata.
17.	Hentikan Politik Upah Murah dan Perampasan Upah. Perbaiki upah kaum buruh dan Berlakukan Segera Sistem Upah Minimum Nasional (UMN).
18.	Hentikan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (RUU PPP), sebagai akal bulus Pemerintah-DPR-RI meloloskan Omnibus Law Cipta Kerja (UU Nomor 11 tahun 2020) lepas dari status inkonstitusional.
19.	Cabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (In-konstitusional) dan seluruh regulasi/peraturan turunannya.
20.	Tolak penundaan pemilu serta perpanjangan masa jabatan presiden

Banyak bergabai organisasi atau serikat buruh yang muncul menuntut untuk dicabutnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Pegawai Kerja. Lahirnya PP 78/2015 tentang pengupahan ini menjadi salah satu paket kebijakan ekonomi jilid IV Jokowi yang lebih berpihak kepada kepentingan pemodal dan mengorbankan nasib buruh untuk mendapatkan upah layak. Dengan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang baru ini, formulasi upah kedepannya dihitung hanya sekedar angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah (BPS), dengan mengabaikan survey harga-harga kebutuhan pokok setiap tahunnya yang menjadi patokan Komponen Hidup Layak (LBH Jakarta, 2015). Selain itu dengan adanya PP ini kewenangan dewan pengupahan dalam menentukan besaran upah juga diambil alih oleh BPS. Karena peraturan pemerintah ini sebagai bentuk dari politik upah murah yang tidak berpihak terhadap kondisi upah layak bagi buruh.

Selain PP No. 78 tahun 2015, Dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja (soal upah) ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil (ketentuan ini membuka ruang adanya upah

per jam). Ketika upah dibayarkan per jam (satuan waktu dan hasil), maka otomatis upah minimum akan hilang, dan akibatnya nanti hanya akan ada buruh harian lepas dan buruh borongan. Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral (UMSK) dihilangkan (di hapus), yang ada hanya Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Penetapan kenaikan Upah Minimum pun hanya dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi di tiap daerah.

Omnibus Law juga memuat ketentuan upah minimum padat karya termasuk fungsi dan Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten pun dihilangkan. Artinya, akan ada upah di bawah upah minimum. Padahal fungsi upah minimum sendiri merupakan jaring pengaman. Tidak boleh ada upah yang nilainya di bawah upah minimum. Tidak ada larangan bagi pengusaha membayar upah dibawah ketentuan upah minimum. Upah Minimum semakin tidak lagi memiliki arti, karena sanksi pidana bagi pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum dihilangkan.

Pada dasarnya, jika para buruh bisa menerima upah yang sesuai dan setiap keputusan para kapitalis dan pemerintah bisa seimbang maka para buruh tidak akan melakukan berbagai aksi, kini bisa di katakan juga bahwa aksi buruh ini merupakan sebuah rutinitas yang dilakukan para buruh setiap tahunnya dan rutinitas tersebut seolah tidak ada memiliki solusi lain, karena memang upah yang diterima oleh buruh itu belum sesuai dengan standar kehidupan yang layak sehingga selama hal itu belum juga di selesaikan, maka buruh akan tetap melakukan aksi dan meskipun upah buruh itu naik, tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak bisa mengimbangi naiknya inflasi.

Untuk bisa menyelesaikan hal tersebut, maka sudah seharusnya ada kebijakan baru yang dapat menyelesaikan hal tersebut, namun pada kenyataannya sebuah kebijakan selalu bertumpu pada mekanisme pasar, dimana sebuah kebijakan ini hanya akan menguntungkan para pemodal, meskipun pada dasarnya kepentingan rakyat ini sebagai sebuah tanggung jawab Negara namun pada kenyataannya para pemodal lebih berkuasa, sehingga meskipun adanya sebuah kebijakan terkait kebebasan buruh dan semacamnya kebijakan tersebut tidak berjalan dengan seharusnya dan tidak terlalu ketat dan selalu ada kelonggaran terkait kebijakan tersebut.

Upah memang sangat penting bagi kaum buruh, karena hal ini merupakan kebutuhan perekonomian dan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya PP tersebut, Upah Minimum Kerja pun terdampak dari adanya PP tersebut. Maka dari itu, penulisan artikel ini adalah untuk bisa mengetahui situasi dan kondisi perburuhan terkait pengupahan yang didapatkan oleh kaum buruh. Penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai tentang gerakan buruh terutama dalam Gerakan Serikat Buruh Indonesia. Serta diharapkan artikel dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis secara khusus dan masyarakat pada umumnya, serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan kepada pembaca.

Upah yang harusnya mencakup semua namun pada kenyataan upah hanyalah gaji pokok saja tanpa adanya tunjangan, dan masih dikatakan jauh dari kebutuhan sehari-hari pekerja. Tentu kesejahteraan pekerja merupakan yang sifatnya rohani dan jasmani, yang mana langsung maupun tidak langsung mempengaruhi produktivitas buruh. Diluar hubungan pekerjaan, secara tidak langsung dan langsung bisa mempengaruhi produktivitas, ketentraman dan kenyamanan fasilitas yang harusnya disediakan oleh pengusaha yang mana aspek dari kesejahteraan yang harus diterima oleh buruh. Dilapangan amat jarang diketahui, terkadang ruangan yang disediakan untuk buruh terkesan jauh dari nyaman, sudah beruntung diberi ruangannya, terkadang ada toilet yang dirangkap bersamaan dengan ruang serba guna untuk buruh.

Jaminan sosial bagi buruh merupakan salah satu hak yang wajib diberikan oleh pengusaha sebagai suatu bentuk perlindungan untuk para pekerjanya seperti adanya santunan, pelayanan akibat dari kejadian kecelakaan kerja yang dialami oleh buruh, saat sakit, melahirkan, hamil, jaminan hari tua, dan meninggal. Jaminan sosial tentu penting sebagai bentuk perlindungan buruh, namun ironis jaminan sosial bagi pekerja atau buruh amat jarang diberi oleh pengusaha selaku pemilik modal dan alasannya selalu sama yakni bertambahnya biaya produksi. Adapun jika ada yakni bisa didapat tapi tidak sesuai dengan resiko yang dikerjakan oleh buruh. Kecilnya upah

yang tentu tidak sesuai dengan berpengaruh pada jaminan sosial bagi buruh, di Indonesia buruh secara terlihat kesejahteraan nya dapat dilihat dari berapa upah minimum yang yang di dapat. Baik Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten, ataupun Upah Minimum Regional (UMR). Pengusaha akan melihat berapa upah minimum yang sudah dipatok kepada pekerja/buruh, upah minimum juga menjadi cerminan bagaimana hubungan pengusaha, negara, dan buruh. Namun pada upah yang sudah ditetapkan seminimalnya negara yang harus berperan dan menonjol, dalam penetapan upah minimum yang dilihat dari cara intervensi yang dilakukan negara terhadap pasar dan para buruh di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Kesejahteraan yang dinilai dari upah bertujuan guna mengiilangkan masalah kemiskinan yang bisa dipicu dari adanya berapa upah yang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh buruh sebagaimana untuk seminimalnya memenuhi standar minimal kehidupan. Kebijakan mengenai upah minimum menyebabkan buruh mau tidak mau dituntut supaya bekerja dengan keras serta jam kerja yang melebihi aturan kerja agar menutupi kekurangan biaya hidupnya. Adanya kontrol mengoptimisasi terhadap upah minimum menguntungkan pengusaha karena bebas dalam menentukan berapa upah yang dapat dibayarkan.

Aturan yang diberikan upah minimum yang masih diatur oleh negara sehingga terkadang ketika buruh berdemonstrasi terkadang tidak mewakili aspirasi para buruh. Fakta upah minimum yang kurang dan tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh para buruh sangatlah kecil terkadang untuk mencukupi kebutuhan minimum nya pun haruslah melebihi batas jam kerja yang sudah ditentukan agar mendapat tambahan upah. Agar buruh dapat menutupi kekurangan kebutuhan minimumnya terkadang buruh rela meminjam uang demi menutupi kebutuhan sehari-harinya. Terkadang untuk memiliki sesuatu yang diinginkan, para buruh meminjam uang atau mengkreditkan sesuatu barang yang mereka inginkan namun justru ini dapat menjadi beban tambahan ekonomi buruh. Disisi lain buruh juga terkadang melakukan pekerjaan diluar dari kerjaan mereka sebagai buruh, dengan memiliki kerjaan sampingan pada sektor informal ataupun pertanian sehingga mau tidak mau buruh mengharuskan jam kerjanya bertambah diluar sebagai statusnya sebagai buruh.

Tentu untuk mendapatkan arti dari kesejahteraan pun terkadang amat sulit bagi buruh untuk mendapatkannya, masalah sosial menjadi penyebab dari adanya ketidaksejahteraan bagi buruh. Lingkungan social yang kurang baik, kecilnya jaminan sosial dan ketersediaan akses kesehatan yang tidak sesuai seakan sudah menjadi melekat pada buruh. Masalah soal kesejahteraan buruh memang tidak pernah selesai dan belum dapat di selesaikan oleh negara ataupun oleh buruh bahkan pemilik modal.

Dari masing-masing pemilik modal, negara, ataupun buruh memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Sebagaimana sebelumnya buruh hanya ingin menuntut kesejahteraan sehingga kebutuhan minimum nya dapat terpenuhi dengan baik ataupun mendapatkan upah yang sesuai dengan bagaimana produktivitasnya. Negara juga memiliki peran yang tentu saja besar dalam harapannya untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan tentu terbuka nya lapangan kerja yang luas. Tidak luput pengusaha yang ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan memberikan upah pekerjaanya seminimal mungkin.

Dari tiga kepentingan yang berbeda-beda inilah kemudain menjadi tuntutan untuk sama-sama mendiskusikan satu sama lain sebagai bentuk pemecah pada kaitan dengan kesejahteraan buruh dan solusi daripada kesejahteraan buruh. Serikat buruh yang memiliki kepentingan dalam hal kesejahteraan buruh dalam melakukan gerakan pasti adanya serikat, serikat buruh adalah jalan untuk melakukan salatu gerakan untuk melawan dengan cara berserikat.

Adanya batasan gerakan buruh ini saat bernegosiasi dengan negara ataupun pemilik modal. Posisi buruh dalam hal negosiasi ini sebagaimana memposisikan untuk menawar upah yang sesuai sehingga seringnya akan terjadi gagal yang berpihak pada buruh. Gerakan serikat buruh yang kurang maksimal juga berdampak gerakan yang dilakukan buruh juga tidak maksimal.

Ketika buruh melakukan perlawanan sebagai bentuk tuntutan mereka atas kesejahteraan, buruh malah mendapat pemutusan hubungan kerja (phk) secara sepihak.

Tentu ini juga menjadi masalah yang tidak seharusnya terulang secara terus menerus, pengusaha diminta memiliki koperasi guan menjamin buruh sehingga apabila terjadi pemutusan hubungan kerja maka jaminan sosial nya dapat di beri oleh koperasi sebagai penghimpun keuangan buruh dalam melaksanakan aksi. Adanya kesejahteraan buruh dan dijaminnya kehidupan buruh, akan menignkatkan dalam menawar. Pengusaha juga tidak dapat melakuakn cara yang sewenangnyanya akibat dari solidaritas serikat buruh. Pengusaha juga harus memiliki pandangan yang berbeda terhadap buruh, buruh juga merupakan bagian penting bagi pengusaha untuk melakukan produksi dan beban pada prroduksi tidak akan lagi mengurangi kesejahteraan pada buruh ataupun adanya pemutusan hhubungan kerja. Namun perusahaan biasanya melakukan konsep CSR (Corporate Social Responsibility) merupakan salah satu tanggung jawab pengusaha pada rakyat. Kemudian solusi dari negara masuk sebagai peranan dalam mensejahterakan buruh. Regulasi tentang upah minimum haruslah adil bagi buruh tidak juga merugikan pengusaha, UMR (upah minimum rakyat) haruslah menyesuaikan dengan kebutuhan minimum nyata untuk buruh.

Upah minimum juga harus menyesuaikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang menyesuaikan dengan tingkat inflasi dan kebutuhan minimum buruh. Negara juga harus menjadi penengah diantara kepentingan pengusaha dan buruh. Kebijakan yang dibuat pemerintah harus benar-benar adil sehingga pemerintah tidak berpihak penuh pada pengusaha dan menjadi lemah terhadap pengusaha. Itu dapat berjalan namun memerlukan kerjasama semua pihak baik itu pengusaha, buruh, ataupun negara. Kesejahteraan untuk buruh haruslah tercipt agar mendapatkan rasa adil bagi buruh. Hubungan pengusaha dan buruh tidak semata budak dan majikan, namun ialah sebagai kolega, tentu buruh berperan penting dalam keuntungan bagi pengusaha, namun disisi lain pengusaha juga ingin memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya.

Gerakan buruh sebenarnya sudah lama ada sebagai mediia dalam menyampaikan buruh menuju kepada kesejahteraan. Awalnya gerakan buruh ini merupakan aksi dalam penindasan oleh pengusaha. Penindasan itu yakni upah yang rendah dan tidak sesuai, jam kerja yang melebihi rata-rata, tidak ada jaminan haritua. Gerakan buruh tidak lepas dari gerakan politik. Lahirnya gerakan buruh ditentukan oleh ideologi yang berkembang tentang keresahan buruh dimasa itu. Jauh sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaanya, gerakan buruh ini sudah ada pada 1905 yang mana berdirinya serikat buruh keretta api.

Gerakan serikat buruh yang usianya lebih dari seabad ini alami naik turun. Di masa Orde Baru yang manaa kala itu pemerintah mengeluarkan penerapan single union system. Pergerakan buruh dan reformasi melalui ILO 101 membebaskan buruh dalam berserikat. Hadirnya legalisasi itulah menjadi udara segar bagi buruh sebab buruh mempunyai kebebasan dan hak yang setara dalam upaya membentuk aliansi serikat buruh. Namun dibalik angin segar yang didapat kaum buruh Indonesia, dan banyaknya aliansi ataupun serikat maka akan banyakk fragmenttasi.

Adanya pemikiran ideologi tentang buruh ditambah perjuangan, aliansi atau serikat buruh menjadi subjektif suaranya saat menghadapi kebijakan pemerintah ataupun pemerintah. Adapun delima yang dialami pemerintah ataupun pengusaha yakni bagaimana aliansi atau serikat yang benar-benar memperlihatkan keinginan buruh. Akibat dari itu gerakan aliansi atau buruh mengakibatkan terhadap penurunan kesejahteraan. Sebab buruh tidak mempunyai lagi daya menawar yang cukup pada pemerintah ataupun pengusaha.

Data ILO pada 2011 mencatat ada 90 aliansi buruh, 5 konfederrasi besar dengan beranggotakan lebih dari 3 juta. Dari adanya fenomena itu bukan berarti dengan seberapa banyak aliansi atau serikat buruh tidak menjamin banyaknya ellipse buruh juga kepentingan. Oleh karenanya muncul pertanyaan tentang kebebasan serikat malah akan menjadi bumerang bagi buruh sendiri, sebab sesudah reformasi keadaan buruh seperti tiada perubahan.

Tentunya ini berbalik arah dengan apa yang sudah Undang-Undang amanatkan, seperti pada UU No. 13 Tahun 2003 pasal 17 bahwasanya terbentuknya aliansi serikat buruh atau pekerja memiliki tujuan untuk memperjuangkan hak buruh dalam meningkatkan kesejahteraan dan untuk melindungi hak nya sebagai buruh, ketika upah minimum selalu di protes oleh buruh. Dikatakan bahwasanya demo tuntutan upah yang dilakukan oleh buruh terjadi setiap tahun dan seperti tidak adanya solusi.

Upah minimum yang diterima buruh masih dikatakan jauh standar kelayakan jika dari negara tetangganya yang 2 sampai 3 kali upah buruh dalam satu bulan. Adapun jika upah para buruh naik juga belum dapat menyeimbangkan antara upah yang didapat dan menyaingi antara inflasi. Seringnya aksi demo buruh dikarenakan bebasnya undang-undang tentang kebebasan alian atau berserikat untuk buruh.

Pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 pada pasal 5 (2) yang mana sekurangnya adalah 10 orang. Perlunya perketatan untuk merevisi undang-undang tersebut supaya dapat bersatu antar buruh secara nasional, dan persatuan buruh akan kuat. Perjuangan kaum buruh dalam menuntuk kesejahteraannya dinilai masih belum ada keseriusannya nataru kebijakan negara yang dibuat ataupun pengusaha, meski beberapa tuntutan dipenuhi oleh negara namun tetap saja masih belum dapat mendapatkan upah yang layak bagi buruh.

Saat ini gerakan yang dilakukan oleh buruh condong kritis, seperti memblokir akses jalan agar tuntutan nya dipenuhi, mengajak buruh yang lain untuk ikut mogok kerja secara serentak. Tetapi posisi buruh juga kurang beruntung sebab jika dihadapkan dengan pengusaha merasa lemah, oleh karenanya peran pemerintah disini dibutuhkan guna menjadi pengawas dan penengah dari kedua belah pihak. Dan meminimalisir terjadinya gesekan antara buruh dan pengusaha.

Dibutuhkannya strategi baru dalam pergerakan buruh di Indonesia, sehingga kesejahteraan buruh bisa tercapai dan gerakan buruh dalam memperjuangkan kesejahteraan dapat tercapai. Gerakan buruh pada pembentukan serikat terkadang berbentur dengan kepentingan politik dan terbentuknya partai buruh. Terkadang kepentingan ini di peringati ITUC sebuah wadah serikat buruh dunia yang menegaskan bahwa gerakan serikat buruh harus bersifat independen.

Dengan adanya gerakan buruh ini memang tidak salah jika serikat buruh membentuk partai guna mewakili suara buruh di parlemen. Sehingga nantinya pembentukan partai ini menjadi representasi dari perjuangan buruh. Jumlah buruh menurut data badan pusat statistik mencapai 55,27 juta (data BPS 2019). Sehingga jika ini dirasa mampu dan bisa dimanfaatkan untuk perjuangan kaum buruh maka dapat memiliki suara di parlemen. Maka buruh di parlemen dapat mempengaruhi keadaan politik di Indonesia, oleh karenanya dengan adanya suara di parlemen suara buruh juga dapat berpengaruh pada kebijakan dan mewakili suara rakyat.

Buruh berada dalam posisi tawar yang baik jikalau mampu membuat partai buruh sendiri. Sebab adanya partai yang mewakili suara buruh sehingga suara dan gerakan buruh menjadi satu visi dan misi dan tidak terpecah. Dilihat dari sejarah setelah reformasi yang mana kala itu partai menggunakan panggung buruh dan tidak mendapatkan suara kurang dari 3 persen suara. Dari sejarah tersebut bisa dilihat bahwasanya dengan adanya serikat buruh yang banyak ini berakibat pada suara yang tidak kompak pada buruh.

Buruh terbagi-bagi dalam kepentingan dan ideologi yang berbeda. Juga kecilnya pondasi dari partai yang mempunyai panggung buruh dapat suara yang rendah didapat dan diasumsi bahwanya tokoh-tokoh gerakan buruh itu dapat mewakili suara buruh. Partai buruh memiliki kondisi yang berbeda penguatsan peran buruh pada parlemen. Karenanya gerakan buruh sebagai gerakan yang dapat mewakili buruh Indonesia di parlemen untuk membantu buruh dalam memperjuangkan haknya dan dapat mempengaruhi kebijakan sehingga tuntutan buruh terwakili.

Menurut Teori Marxisme : Marxisme mengadopsi pandangan materialisme historis, yaitu keyakinan bahwa faktor-faktor material, seperti produksi dan kepemilikan ekonomi, merupakan kekuatan utama yang membentuk perkembangan sejarah. Marx percaya bahwa struktur ekonomi

masyarakat, terutama cara produksi dan kepemilikan alat produksi, akan menentukan bentuk dan sifat dari lembaga sosial dan politik.

**Pertentangan Kelas:** Marxisme menganalisis masyarakat sebagai sebuah arena pertentangan antara dua kelas utama, yaitu buruh (proletariat) dan pemilik modal (borjuis). Marx berpendapat bahwa dalam masyarakat kapitalis, pemilik modal memperoleh keuntungan dari eksploitasi tenaga kerja buruh. Pertentangan kelas ini diyakini akan terus meningkat hingga mencapai titik di mana buruh akan menggulingkan borjuis dan membentuk masyarakat tanpa kelas (komunisme).

**Alienable Labor (Tenaga Kerja yang Dikapitalisasi):** Marx menyatakan bahwa dalam masyarakat kapitalis, tenaga kerja buruh diperlakukan sebagai komoditas yang dapat dibeli dan dijual. Buruh menjual tenaga kerjanya kepada pemilik modal dengan imbalan upah. Marx berpendapat bahwa dalam proses ini, buruh kehilangan kendali atas produk kerjanya dan merasa teralienasi dari kerja yang mereka lakukan. **Kapitalisme dan Eksploitasi:** Marxisme mengkritik kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang mendasarkan keuntungan pada eksploitasi buruh. Marx menyatakan bahwa pemilik modal mengambil surplus nilai dari hasil produksi buruh, yang mengakibatkan pertumbuhan ketidaksetaraan dan penderitaan bagi kelas pekerja.

**Revolusi Proletariat:** Marxisme meyakini bahwa akhirnya, pertentangan kelas akan mencapai titik di mana proletariat akan menyadari kondisi eksploitasi mereka dan memberontak melawan sistem kapitalis. Marx menekankan pentingnya revolusi proletariat untuk menggulingkan borjuis dan membentuk masyarakat sosialis atau komunis di mana kepemilikan alat produksi dikendalikan secara kolektif.

**Diktariat Proletariat:** Marxisme mengusulkan bahwa setelah revolusi, proletariat harus membentuk diktariat proletariat sebagai tahap transisi menuju masyarakat komunis yang sebenarnya. Diktariat proletariat adalah pemerintahan kelas pekerja yang bertujuan untuk menghilangkan kekuasaan borjuis dan mempersiapkan transformasi masyarakat menuju komunisme. **Komunisme:** Marxisme mengejar visi akhir dari masyarakat komunis di mana tidak ada kepemilikan pribadi atas alat produksi, tidak ada kelas

## SIMPULAN

Seorang pekerja atau buruh adalah tenaga kerja dan karyawan sebutan untuk buruh yang lebih tinggi dan diberikan kepada buruh yang tidak memakai otot tetapi otak dalam bekerja. Aksi demonstrasi merupakan fenomena yang bisa diketahui sumber pemberitahuannya terkait dengan upah dan kesejahteraan yakni adanya aksi yang dilakukan oleh sejumlah aliansi para buruh Indonesia di Ibu Kota Negara, seperti di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia (Kemenaker). Di sisi lain juga buruh juga agar dapat tercapai terjaminnya standar hidup yang baik bagi para buruh serta keluarganya, dapat meningkatkan produktivitas serta daya beli masyarakat yang meningkat. Sering terjadinya aksi mogok kerja oleh buruh di daerah-daerah di Indonesia merupakan bentuk kekecewaan buruh terhadap kesejahteraan dan upah yang tidak sebanding. Hingga saat ini banyak gerakan-gerakan buruh selain GSBI yang membentuk kelompok civil society, Adapun aksi-aksi yang dilakukan oleh para buruh salah satu cara yang ampuh, karenanya penawaran kerja yang besar jika di dibandingkan dengan permintaan yakni amat efektif supaya dapat memperlmah posisi buruh dalam upaya memperjuangkan tuntutan dan haknya. Dalam merumuskan terkait upah dan kesejahteraan, buruh memiliki cenderung agar dapat upah yang tinggi supaya mendapat kehidupan yang layak. Adapun pengusaha cenderung ingin memberi upah yang rendah kepada buruh sebab upah berdampak pada keuntungan yang berkurang, sebab semakin tinggi upah yang diberi akan semakin mengurangi keuntungan pengusaha. Di dalam keadaan yang mana faktor produksi seluruhnya terpakai, pada sistem upah ini buruh dan pengusaha bernegosiasi untuk tawar menawar supaya terjadi kesepakatan antara buruh dan pengusaha. Tahun ke tahun masalah yang sama muncul yakni bertujuan menaikkan upah para buruh, karena hal ini yang para buruh merasa tidak sesuai dengan kebutuhan sehari-harinya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arti Kata Gerakan Menurut KBBI. (n.d.). *Artikel*. JagoKata.Com. Retrieved April 17, 2020, from <https://jagokata.com/arti-kata/gerakan.html>.
- Fadillah Putra Dkk. (2006). *Gerakan Sosial*. Malang: Averrors Press.
- GSBI. (Tt). Tentang Gerakan Serikat Buruh Indonesia (GSBI). *Artikel*. <https://www.infogsbi.or.id/p/entang.html>.
- Habermas, Jurgen. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into A Category of Bourgeois Society*. Cambridge, MA: MIT Press.
- LBH Jakarta. (2015). Buruh Tolak PP 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Bantuan. *Artikel*. <https://bantuanhukum.or.id/buruh-tolak-pp-78-tahun-2015-tentang-pengupahan/>.
- Marx, Karl. (1977). *The German Ideology*, dalam David McLellan (ed.). Karl Marx: Selected Writing. London: Oxford University Press.
- Tempo.co. (Tt). Aliansi Gerakan Buruh Gelar Aksi Demo 21 Mei Membawa 14 Tuntutan. *Artikel*. <https://nasional.tempo.co/read/1593214/aliansi-gerakan-buruh-gelar-aksi-demo-21-mei-membawa-14-tuntutan> diakses pada tanggal 31 Mei 2022 pukul 17.50.